**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Dunia pendidikan merupakan pemegang peranan penting untuk menjadikan kehidupan manusia lebih baik dan berguna bagi dirinya, bagi orang lain dan lingkungan keberadaannya. Pendidikan memberikan kemajuan besar dalam proses pembelajaran, pengembangan wawasan, dan menjadi modal bagi manusia untuk menjalankan roda kehidupan, untuk itu pendidikan harus terus dikembangkan agar dapat bermanfaat dan berkualitas bagi manusia.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia merupakan pengelola sistem pendidikan nasional di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan salah satu penyelenggara administrasi pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, badan ini mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Kementerian di bidang pendidikan dasar dan menengah berdasarkan amanat UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Untuk menjalankan amanat Pendidikan Nasional, maka diperlukan arah yang jelas dan Pemerintah sudah menuangkannya ke dalam visi, misi, dan tata nilai yang harus dijalankan. Kunandar (2011:29) menjelaskan : “Visi Pendidikan Nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Republik Indonesia berkembang menjadi manusia berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah”.

1

Selanjutnya Kunandar (2011:29) mengemukakan bahwa Misi Pendidikan Nasional adalah :

1. Sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh masyarakat belajar;
3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global;
5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara kesatuan Republik Indonesia.

Misi pendidikan diatas merupakan misi besar dari negara dan menjadi tugas mulia bagi seluruh rakyat Indonesia, dan untuk mewujudkan misi besar tersebut, pemerintah menetapkan tiga pilar kebijakan pendidikan, yaitu :

1. Upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan;
2. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan;
3. Peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan pendidikan.

Pendidikan adalah elemen penting dalan pembangunan bangsa. Karena pembangunan di bidang pendidikan merupakan upaya penyediaan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional. Pelaksanaan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar maupun jenjang pendidikan menengah, harus diselenggarakan secara profesional dan optimal, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi positif dalam pembangunan bangsa.

Semua potensi harus dikembangkan sebagai upaya meningkatkan daya dukung dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Perencanaan pendidikan harus memperhatikan semua unsur, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung agar proses pendidikan, khususnya pendidik dan tenaga kependidikan , sarana, prasarana, peserta didik, maupun stakeholders dapat berperan serta sehingga proses pendidikan dapat berlangsung secara baik. Olehnya itu perlu adanya penyediaan informasi potensi pendidikan yang akurat sehingga bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang terkait dengan pendidikan.

Persaingan yang makin tinggi pada masa yang akan datang menuntut peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan penerapan Iptek dalam rangka menghadapi perkembangan global menuju ekonomi berbasis pengetahuan. dalam rangka meningkatkan kemampuan Iptek nasional, tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan kontribusi Iptek untuk meningkatkan kemampuan dalam memenuhi hajat hidup bangsa; menciptakan rasa aman; memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, energi, dan pangan; memperkuat sinergi kebijakan Iptek dengan kebijakan sektor lain; mengembangkan budaya Iptek di kalangan masyarakat;meningkatkan komitmen bangsa terhadap pengembangan Iptek; mengatasi degradasi fungsi lingkungan; mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam; serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas sumber daya Iptek, baik SDM, sarana dan prasarana, maupun pembiayaan Iptek. Teknologi informatika dan komunikasi merupakan teknologi yang banyak kaitannya dengan pembangunan pendidikan.

Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) sudah merupakan bagian yang sulit dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dengan TIK semua proses kehidupan menjadi lebih cepat, lebih efisien, lebih akurat, dan lebih indah. Perkembangan TIK juga sudah dimanfaatkan di dunia pendidikan, Aplikasi *e-learning* sudah bukan merupakan barang baru di dunia pendidikan. Proses pembelajaran tidak lagi mengenal keterbatasan ruang dan waktu. Bahkan TIK sudah memungkinkan terjadinya *knowlegde sharing* melalui *e-book* dan *e-library* ( Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2010-2014).

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2010-2014 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab unit kerja untuk terus menerus bekerja memperbaiki kualitas kinerja internal dan kualitas hasilnya. LPMP memiliki tanggungjawab dan kewajiban untuk melakukan tugas dan fungsinya secara efektif, sesuai amanat Permendikbud Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tatakerja LPMP.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Maluku sebagai pengemban tugas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan berada di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan adalah sebuah lembaga pemerintah pusat yang dipercayakan membantu pemerintah daerah untuk mengawal pelaksanaan pendidikan di daerah Maluku. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Maluku sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah, selalu berupaya secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu memfasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan, serta melakukan pemetaan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Salah satu kebijakan yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dituangkan dalam Rencana Strategis ( Renstra ) 2010-2014 adalah Peningkatan Peran Sistem informasi dan komunikasi. Program ini diyakini dapat menunjang upaya peningkatan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, serta tata kelola, akuntabilitas dan citra publik terhadap pendidikan.

Dalam pelaksanaan tugas di daerah, LPMP provinsi Maluku didukung oleh karyawan yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Pemerintah Republik Indonesia dan menjadi kekuatan utama untuk melakukan tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat dan melaksanakan semua program yang ada di LPMP provinsi Maluku. Selain pegawai, sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi kekuatan untuk mensukseskan semua kegiatan atau program yang telah direncanakan.

Untuk mengimplementasi dan mewujudkan kebijakan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam Renstra 2010-2014, maka LPMP provinsi Maluku mengembangkan program pusat layanan informasi dan komunikasi yang berperan untuk mendukung peningkatan kompetensi pegawai serta meningkatkan efisiensi kerja pegawai. Program ini dapat memberikan manfaat untuk mempermudah tugas dan kerja pegawai di LPMP provinsi Maluku, biaya program ini dianggarkan setiap tahun dalam DIPA LPMP provinsi Maluku.

Program ini diharapkan dapat memberikan layanan maksimal dalam penyediaan akses belajar, akses internet, menjadi pusat layanan informasi yang berkualitas,dalam perkembangannya mulai tahun selama 3 tahun terakhir terlihat bahwa ada peningkatan jumlah pegawai yang menggunakan jasa akses internet LPMP Maluku untuk mengambil dan mengirim data secara online. Dan hal ini terlihat pada dokumentasi pengelola laboratorium TIK yang tersaji pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Pemakai jasa Akses Internet LPMP Maluku

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit kerja | Jumlah Pegawai Pemakai Jasa Akses Internet | | |
| 2011 | 2012 | 2013 |
| Sub Bagian Umum | 7 | 12 | 27 |
| Seksi Sistem Informasi | 10 | 15 | 20 |
| Seksi Pemetaan Mutu | 12 | 12 | 18 |
| Seksi Fasilitasi Sumber Daya | 5 | 10 | 12 |
| Kelompok Widyaiswara | 2 | 4 | 7 |

Sumber : Dokumentasi Laboratorium TIK LPMP Maluku 2010-2013

Seiring dengan pelaksanaan program ini juga menghadapi beberapa kendala, dari pengamatan awal yang dilakukan serta wawancara dengan sebagian pegawai mengenai peran dan fungsi pusat layanan informasi dan komunikasi sebagai sarana penunjang pekerjaan, sumber belajar dan pusat layanan informasi dan komunikasi, maka diperoleh beberapa persepsi pegawai yaitu : 1) Pusat layanan informasi dan komunikasi LPMP provinsi Maluku sebagai tempat belajar berjalan dengan baik tetapi layanannya belum menyentuh semua pegawai, 2) Pegawai memiliki minat dan antusias untuk belajar mengenali perkembangan teknologi yang berhubungan dengan komputer dan multimedia tetapi hanya sebagian pegawai yang terlayani, 3) Pusat layanan informasi dan komunikasi yang belum melayani seluruh pegawai yang bekerja di LPMP provinsi Maluku, 4) Koneksi jaringan internet kantor LPMP provinsi Maluku sering bermasalah, 5) Website LPMP provinsi Maluku jarang diperbarui, 6) Tenaga pengelola Pusat layanan informasi dan komunikasi masih kurang, sering terjadi fungsi kerja rangkap di laboratorium ICT dan di seksi asalnya, 7) Pegawai jarang mengunjungi Pusat layanan informasi dan komunikasi, 8) Kondisi ruangan tidak nyaman karena jumlah AC yang terpasang tidak sesuai dengan luas ruangan.

LPMP provinsi Maluku perlu mencari solusi terhadap semua permasalahan yang berhubungan dengan program yang dilakukan di lembaga. Berdasarkan pengamatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelayanan pusat layanan informasi dan komunikasi di LPMP provinsi Maluku belum maksimal. Berdasarkan uraian permasalahan, perlu dilakukan evaluasi mendalam untuk mengetahui kualitas layanan program pengembangan pusat layanan informasi dan komunikasi di LPMP provinsi Maluku.

Untuk menerapkan evaluasi program, maka diperlukan model evaluasi yang menjadi pedoman kerja pelaksanaan evaluasi. Model evaluasi yang digunakan dalam evaluasi ini adalah Model *Goal Oriented* oleh Tyler. Dasar utama penerapan Model *Goal Oriented* adalah relevan dengan target evaluasi. Hal yang menjadi target evaluasi adalah ketercapaian tujuan program serta pelaksanaan dan layanan yang diberikan oleh program pengembangan pusat layanan informasi dan komunikasi di LPMP Maluku. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Wirawan (2011:81) mengemukakan bahwa model evaluasi Berorientasi Tujuan (*Goal Oriented*) secara umum mengukur apakah tujuan yang ditetapkan oleh kebijakan, program atau proyek dapat dicapai atau tidak. Judul evaluasi yang akan peneliti usulkan adalah : “Evaluasi program pengembangan pusat layanan informasi dan komunikasi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku “.

**B. Rumusan Masalah**

Masalah evaluasi merupakan suatu pondasi dalam melakukan suatu evaluasi. Singkatnya, masalah evaluasi adalah adanya gap atau kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, teori dengan praktek, yang seharusnya dengan yang terjadi. Berdasarkan fenomena yang ditemukan pada observasi awal, maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam evaluasi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan fasilitas Laboratorium TIK di LPMP Provinsi Maluku?
2. Bagaimana penyediaan akses internet di LPMP Provinsi Maluku?
3. Bagaimana pengembangan website LPMP Provinsi Maluku?

**C.Tujuan Evaluasi**

Evaluasi dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan sesuai dengan objek evaluasinya dan objek evaluasi dalam evaluasi ini adalah program pengembangan Pusat layanan informasi dan komunikasi yang ada di LPMP provinsi Maluku. Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam evaluasi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengelolaan fasilitas Laboratorium TIK di LPMP Provinsi Maluku.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penyediaan akses internet di LPMP Provinsi Maluku.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengembangan website LPMP Provinsi Maluku.

**D. Manfaat Evaluasi**

Manfaat evaluasi dalam evaluasi ini merupakan dampak dari tercapainya tujuan evaluasi, yaitu mengungkap fenomena yang berhubungan dengan program pengembangan Pusat layanan informasi dan komunikasi di LPMP provinsi Maluku, untuk itu manfaat yang bisa diperoleh dari evaluasi ini adalah :

1. Manfaat teoritik: hasil Evaluasi ini dapat di pakai sebagai acuan bagi peneliti lain untuk pendalaman masalah yang berhubungan dengan program pengembangan Pusat layanan informasi dan komunikasi dan berguna untuk pengembangan keilmuan dalam aplikasi dan evaluasi program.
2. Manfaat Praktis: hasil Evaluasi ini dapat bermanfaat untuk memecahkan dan menjawab fenomena yang berhubungan dengan program pengembangan Pusat layanan informasi dan komunikasi di LPMP provinsi Maluku, dan juga dapat menjadi rekomendasi bagi pembuat kebijakan di LPMP provinsi Maluku untuk mengambil keputusan dalam upaya peningkatan dan perbaikan program pengembangan Pusat layanan informasi dan komunikasi di LPMP provinsi Maluku.
3. Menemukan faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan program pengembangan Pusat layanan informasi dan komunikasi di LPMP provinsi Maluku
4. Menemukan cara yang tepat untuk mengefektifkan program pengembangan pusat layanan informasi dan komunikasi di LPMP provinsi Maluku.